

## DAFTAR PUSTAKA

### A. literatur

Binzad Kadafidkk, Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi Tentang Tanggungjawab Provisi Hukum, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia

Harahap M. Yahya, 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika

Nasution Adnan Buyung, 1982, *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan politik Pembangunan*, Jakarta: LPJES

Pandu Yudha, *Klien dan Penasehat Hukum*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2001

Pettanasse Ansori Sabuan, Syarifudin, dan Ruben Achmad, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa

M Prodjohamidjojo. 1984. Komentor atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Pradnya Paramitha.

R Syaharani, Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana, Alumni Bandung

Soekanto S. 1982. Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Kedua. UI Press.

Suratman Phillips Dillah,. 2013. Metode Penelitian Hukum, Cetakan Kesatu. Bandung: Alfabeta

Sinaga V. Harlen, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Erlangga, 2011)

Marzuki Mahmud Peter,. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Winarta Frans Hendra, 2009, *Pro Bono Publico*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

\_\_\_\_\_, 2011, *Bantuan Hukum Di Indonesia (Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara)*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indoneisa, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.
- \_\_\_\_\_, Prosedur Pemberian Bantuan Hukum terhadap Tersangka atau Terdakwa yang tidak mampu oleh advokat.

### C. JURNAL

ARAFAT MUHAMMAD RUSLI. Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Konflik Struktural (Studi Kasus Pendirian Pabrik Semen di Desa Tegaldowo Kabupaten Rembang) UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN FAKULTAS HUKUM PURWOKERTO 2015

Arif Andry Rahman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Di Kota Bandar Lampung Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 1, Januari-Maret 2015.

Wicaksono Franciscus Xaverius Raditya. *PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN KLIEN PERKARA PIDANA KORUPSI*(JURNAL, SKIPSI, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA FAKULTAS HUKUM 2014)

Zesita Indirani SKRIPSI Prinsip Legal Assistance Dalam Menjamin Hak-Hak Tersangka Yang Tidak Mampu

### D. INTERNET

Anggara. (2011). Organisasi Advokat dan Program Bantuan Hukum Di Indonesia. <http://icjr.or.id/organisasi-advokat-dan-program-bantuan-hukum-di-indonesia/> [16 September 2016]

Hapsari, F. Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Tidak Mampu Oleh Advokat. hal 12. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/viewFile/885/872> [16 September 2016]

Ibnu Muslem. (2012). Penerapan Bantuan Hukum di Indonesia, <http://komhum.blogspot.co.id/2012/02/pendahuluan-selama-ini-yang-terjadi.html> [16 April 2016]

Jupri, S.H. Bantuan Hukum. <http://www.negarahukum.cpm/hukum/bantu-an-hukum.html>, [18September 2016]

Kurniawan, A. (2015). Pengertian Implementasi menurut para ahli.<http://www.gurupendidikan.com/9-pengertian-implementasi-menurut-para-ahli/> [18September 2016]

Suara Merdeka.(2015,14 November). <http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/warga-miskin-akan-mendapat-bantuan-hukum/> [18September 2016]

Tiarramon, S.H,M.H, (2014). Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, <https://tiarramon.wordpress.com/2014/03/23/syarat-dan-tata-cara-pemberian-bantuan-hukum/> [18September 2016]

<http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum>, diunduh pada tanggal 17 Desember 2016

<http://www.suduthukum.com/2016/09/tugas-dan-wewenang-advokat.html>

Boris Tampubolon, S.H. Akibat hukum Jika Hak Tersangka/Terdakwa atas Bantuan Hukum Tak Dipenuhi Harus Diatur Dalam Undang-Undang <http://lbhmawarsaron.or.id/home/akibat-hukum-jika-hak-tersangkaterdakwa-atas-bantuan-hukum-tak-dipenuhi-harus-diatur-dalam-undang-undang/>

#### E. HASIL WAWANCARA

Hasil Wawancara dengan Kasat Kanit PPA Ihwan Ma'ruf, S.H , S.H.,Kabupaten Purbalingga pada tanggal 25 Mei 2017

Hasil Wawan cara dengan Wakil Ketua Pengadilan Negari Purbalingga Sapto Supriyono S.H., di Kabupaten purbalingga pada tanggal 15 Juli 2017